



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, mulai memperkuat pengawasan disiplin aparatur sipil negara (ASN) melalui monitoring langsung ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kehadiran pegawai di tempat kerja.

Kepala BKPSDM Buton Selatan Haida S.Pt, mengatakan monitoring tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan yang menempatkan BKPSDM sebagai perpanjangan tangan bupati dalam mengawasi kedisiplinan ASN. Monitoring awal dilakukan selama dua hari pada pekan lalu

dan akan dilanjutkan secara berkelanjutan. Dalam monitoring tersebut, tim masih menemukan pegawai yang belum berada di kantor ketika pemeriksaan dilakukan sekitar pukul 10.00 WITA. Bahkan, dalam sejumlah kondisi, rekan kerja tidak mengetahui keberadaan pegawai yang belum hadir.

Meski demikian, BKPSDM tidak langsung mengategorikan temuan tersebut sebagai bentuk kemalasan atau pelanggaran berat karena setiap kondisi tetap membutuhkan evaluasi dan penjelasan. "Kalau kita sadarkan diri bahwa masuk kantor itu ada waktunya, disiplin itu harus kita tingkatkan. Jan-

gan sampai di mata masyarakat kita terkesan masuk kantor suka-suka," kata Haida. Hasil monitoring selanjutnya, Kata Haida, dilaporkan kepada Bupati Buton Selatan H Muh Adios sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja dan pembinaan karier ASN. Menurut Haida, pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana ASN menjalankan tugas serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan karier. Secara nasional,

penegakan disiplin PNS memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aturan yang berlaku sejak 31 Agustus 2021 itu mengatur kewajiban, larangan, jenis hukuman disiplin, kewenangan pejabat yang menghukum, hingga hak PNS untuk melakukan upaya administratif. Bagi Buton Selatan, lanjutnya, agenda pembenahan pelayanan dan aparatur memiliki konteks

Lanjut ke Hal: 7

## Ny Siti Norma Adios Dorong TP PKK Buton Selatan Tertibkan Data dan Administrasi



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Penguatan administrasi dan akurasi pendataan menjadi perhatian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (TP PKK) Kabupaten Buton Selatan dalam pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Lapandewa dan Sampolawa, Minggu (6/9/2026). Pembinaan tersebut diar-

ahkan agar pengurus mampu menata data, arsip, program kerja, dan laporan kegiatan secara lebih tertib dari tingkat desa hingga kabupaten. Kegiatan yang berlangsung di Aula Ke-

camatan Sampolawa dan Gedung Sipanjoga Lapandewa itu dipimpin langsung Ketua TP PKK Kabupaten Buton Selatan, Hj. Siti Norma Adios. Peserta terdiri atas pengurus TP PKK tingkat kecamatan dan desa dari kedua wilayah tersebut. Materi diberikan secara praktis sehingga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi di masing-masing desa. Siti Norma menilai pembenahan administrasi tidak sekadar berkaitan dengan kelengkapan doku-

Lanjut ke Hal: 7

## Kepala BPBD Baubau Moh Tasdik Turun Langsung Kaji Kekeringan Bungi, Petani Usulkan PIPANISASI Air



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Sejumlah areal persawahan di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, mulai mengalami kekurangan pasokan air akibat penurunan debit sumber irigasi pada puncak musim kemarau. Pemerintah Kota Baubau kini

memetakan tingkat dampak kekeringan sekaligus menyiapkan langkah jangka pendek, termasuk pengaturan giliran air dan pompanisasi, sementara usulan pipanisasi diarahkan masuk dalam mekanisme perencanaan daerah.

Lanjut ke Hal: 7

## Kebakaran Hanguskan Dua Rumah di Lakudo, Bupati Buton tengah Azhari Pastikan Korban Dibantu



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang hanguskan dua rumah warga di Dusun Liwuto, Desa Wongko Lakudo, Kecamatan Lakudo. Sehari setelah

kejadian, Bupati Buton Tengah Dr. Azhari turun langsung menemui korban dan menyerahkan bantuan kebutuhan dasar untuk masa tanggap darurat, Senin (7/9/2026). Kebakaran terjadi pada Minggu

Lanjut ke Hal: 7

## Pengurus HKTI Baubau Terbentuk, Tiga Kecamatan Jadi Basis Pertanian, iap Dilantik Serentak di Kendari 10 September 2026



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Baubau terbentuk dan akan dikukuhkan bersama kepengurusan HKTI 17 kabupaten/kota se-Sulawesi

Tenggara di Kendari, Kamis (10/9/2026). Pembentukan organisasi tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku sektor pangan di daerah. Rapat pembentukan berlangsung di ruang kerja Wakil Wali

Kota Baubau, Selasa (8/9/2026), dipimpin Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc. Sejumlah pejabat pemerintah daerah hadir, antara lain Kepala Baperida, Kepala

Lanjut ke Hal: 7

## Prabowo Respons Pidato AHY yang Disebut Kritik Pemerintah



Presiden Prabowo merespons pidato AHY di HUT ke-25 Partai Demokrat.

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Presiden RI Prabowo Subianto merespons pidato Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilai kritik terhadap pemerintahan hari ini.

Prabowo menyatakan jika memang pidato itu bernuansa kritik, maka hal itu lumrah dalam kehidupan berdemokrasi.

“Memang kemarin itu ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY beberapa hari lalu katanya adalah kritik tajam, tapi saudara-saudara memang bangsa yang besar yang sudah memilih jalan demokrasi harus berterima kasih atas kritik dan koreksi,” kata Prabowo di Perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (9/9).

Meski begitu,

Prabowo menyinggung pernyataan AHY yang menyatakan bahwa AHY dan Demokrat tetap bersama-sama bekerja demi kepentingan rakyat.

“Tapi yang jelas beliau tegas menyampaikan itikad beliau dan itikad Demokrat yaitu bersama-sama kita bekerja untuk rakyat,” ucap dia.

Dalam pidatonya di acara yang sama, AHY menyatakan tujuan Demokrat adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto.

Posisi Demokrat jelas, kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil, tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini,” ucap AHY.

AHY menekankan jika

pemerintahan hari ini berhasil, maka ini bukan keberhasilan pemerintah semata, tetapi seluruh rakyat Indonesia.

Pidato politik AHY pada HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9) lalu menjadi sorotan lantaran dianggap menjabar di ‘pemanasan’ jelang Pilpres 2029.

Dalam pidatonya, AHY menyinggung sejumlah isu terkait pemilihan dengan meminta seluruh kader, baik yang berada di eksekutif, legislatif, maupun kepala daerah senantiasa peka dan jujur terhadap kenyataan yang dirasakan rakyat di lapangan.

Ia juga menyinggung pentingnya profesionalisme dan netralitas bagi seluruh alat serba aparaturnegara, terutama ketika Pemilu.

“Kekuasaan bukan milik

seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.

Merespons itu, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berpendapat bahwa pidato itu mengisyaratkan bahwa AHY akan menjadi salah satu kontestan di Pilpres 2029.

“Namun, dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing positionnya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” kata Doli saat dihubungi, Senin (7/9).

Doli pun menduga dua poros kekuatan politik telah memasang ‘kuda-kuda’ persiapan untuk pemilihan presiden mendatang. (\*)

## HUT ke-25 Demokrat, AHY Pastikan Partainya Tetap Loyal Mendukung Prabowo



Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya dapat diandalkan sebagai salah satu anggota koalisi pemerintah.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kesiapan partainya untuk menjadi kekuatan politik yang dapat diandalkan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Komite itu disampaikan AHY saat Partai Demokrat memperingati seperempat abad perjalanan politiknya.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam pidato politik pada puncak HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (9/9) malam. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara tersebut.

AHY menilai loyalitas dan kemampuan untuk diandalkan merupakan nilai penting dalam menjalankan sebuah misi. Ia kemudian membawa nilai yang dikenal dalam tradisi militer itu ke dalam konteks hubungan politik Demokrat dengan pemerintahan Prabowo.

“Karena itu izinkan bapak presiden, saya menyampaikan dengan tulus, bahwa bapak presiden dapat mengandalkan Partai Demokrat,” kata AHY dalam pidatonya.

Menurut AHY, seseorang yang menjalankan sebuah misi harus mengetahui siapa

saja yang akan tetap berada di sisinya dalam berbagai keadaan. Prinsip tersebut, kata dia, menjadi gambaran mengenai sikap yang hendak ditunjukkan Demokrat sebagai bagian dari koalisi pemerintah.

AHY juga menyatakan Demokrat akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Kami akan bekerja dengan loyalitas, kami akan menjalankan amanah, dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Pidato itu disampaikan AHY dalam posisi yang menurutnya cukup sensitif. Ia mengaku berada di antara dua tokoh senior dengan latar belakang militer dan politik, yakni Prabowo serta ayahnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Karena salah sedikit risikonya datang dari dua arah. Dari dua senior. Namun, ada satu hal yang tidak perlu saya baca verbatim dari teks. Karena datang dari keyakinan saya sendiri,” tutur AHY.

Sikap AHY tersebut sekaligus menegaskan posisi Demokrat yang kini kembali berada di dalam pemerintahan nasional setelah sebelumnya pernah menjadi kekuatan utama pemerintahan dan juga berada di luar pemerintahan. Partai Demokrat

sendiri didirikan pada 9 September 2001 dan memasuki usia 25 tahun pada 2026.

Dalam sejarah politik nasional, Demokrat mengalami fase penting ketika SBY terpilih sebagai Presiden RI melalui pemilihan langsung pada 2004 dan kemudian memimpin pemerintahan selama dua periode, 2004-2014. Demokrat mencatat 7,45 persen suara atau 8.455.225 suara dalam Pemilu Legislatif 2004 dan memperoleh 57 kursi DPR RI.

Sementara itu, Prabowo kini memimpin pemerintahan periode 2024-2029 setelah dilantik sebagai Presiden bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Pemerintahannya kemudian membentuk Kabinet Merah Putih sebagai kabinet periode 2024-2029.

Dalam momentum seperempat abad Demokrat tersebut, pesan AHY kepada Prabowo memperlihatkan penekanan pada loyalitas, tanggung jawab, dan kesinambungan dukungan politik. Bagi Demokrat, posisi sebagai bagian dari pemerintahan juga menjadi babak baru setelah melewati perjalanan politik selama 25 tahun dengan dinamika sebagai partai pemerintah maupun di luar pemerintahan. (\*)

## Wali Kota Siska Hadiri FGD Kejati Sultra Bahas Pemulihan Aset SDA



### Laporan: Mashuri

KENDARI, BP- Penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam (SDA) di Sulawesi Tenggara mulai diarahkan tidak sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan aset negara kembali, kerugian dipulihkan, dan lingkungan yang rusak diperbaiki. Arah baru tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari, Selasa (8/9/2026), yang turut dihadiri Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM.

FGD dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-81 Kejaksaan RI itu mengangkat tema "Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset SDA: Membangun Keadilan Restoratif, Legal Resilience, dan Tata Kelola Berkelanjutan". Forum tersebut dibuka Wakil Jaksa Agung RI Asep Nana Mulyana dan mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, praktisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan sektor SDA.

Asep menilai penanganan perkara SDA selama ini terlalu sering berhenti pada pelaku lapangan. Padahal, tindak pidana yang bermotif ekonomi perlu ditelusuri hingga aktor intelektual, pengendali, korporasi, pemilik modal, dan pihak yang menikmati keuntungan. "Tidak pernah

kemudian menysasar kepada aktor intelektualnya, korporasi misalnya, pemilik korporasi, termasuk bagaimana manfaat dari korporasi," ujarnya.

Gagasan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum lingkungan global. UNEP mencatat bahwa pertumbuhan regulasi lingkungan di dunia tidak otomatis diikuti penegakan yang efektif. Laporan global pertama mengenai environmental rule of law pada 2019 menyebut jumlah peraturan lingkungan meningkat 38 kali sejak 1972, tetapi lemahnya implementasi dan penegakan tetap menjadi persoalan besar.

Di tingkat nasional, perubahan orientasi kelembagaan Kejaksaan juga memiliki akar sejarah panjang. Secara yuridis, Kejaksaan RI telah ada sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pada 19 Agustus 1945 ditempatkan dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Penetapan 2 September sebagai Hari Lahir Kejaksaan didasarkan pada pe-lantikan Jaksa Agung pertama, Mr. Gatot Tarunamihardja, pada 2 September 1945.

Kajati Sultra Sugeng Rianta mengatakan perubahan paradigma itu menjadi alasan utama pihaknya menginisiasi FGD. Berdasarkan survei terhadap 622 responden yang berasal dari aparat penegak hukum, hakim, jaksa, PPNS, penyidik,

pengacara, praktisi pertambangan, ASN, hingga pengusaha, pendekatan konvensional dinilai belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan hukum karena pemi-danaan belum tentu memulihkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara.

"Bukan orang dipenjara, apalagi dipenjara lama, tetapi ekosistem rusak," kata Sugeng. Hasil survei menunjukkan harapan terhadap pendekatan restoratif, kolaboratif, dan rehabilitatif cukup tinggi. Keinginan agar penegakan hukum SDA berorientasi pada pengembalian kerugian negara dan perbaikan ekosistem memperoleh skor 4,72.

Di Sultra, kebutuhan pendekatan tersebut berkaitan erat dengan besarnya potensi ekonomi SDA, terutama nikel. Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyebut produksi nikel daerah ini berdasarkan hitung-hitungan kasarnya mencapai sekitar 88 juta metrik ton per tahun atau sekitar 60 persen produksi nikel Indonesia, dengan nilai ekonomi diperkirakan Rp119 triliun. Sementara dana transfer yang diterima daerah disebut sekitar Rp800 miliar pada 2023 dan lebih dari Rp200 miliar pada 2024.

Dari sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK dan mendapat perhatian KPK, Andi menyebut dua aset telah berhasil dikembalikan, yak-

ni satu bangunan dan satu aset tanah dengan luas kurang lebih 49 hektare. Ia meminta Kejati Sultra melalui fungsi Pengacara Negara terus membantu pemerintah daerah memulihkan aset dan kewajiban yang menjadi hak daerah. "Tanpa kolaborasi, tanpa kerja sama, maka tidak mungkin kita bisa selesaikan," ujarnya.

Pendekatan pemulihan itu juga mendapat konteks lebih luas dalam perkembangan hukum lingkungan internasional. UNEP menempatkan environmental rule of law sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan karena menghubungkan penegakan hukum, hak masyarakat, perlindungan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Sejak 2013, UNEP mendorong negara-negara memperkuat kerja sama untuk mengatasi pelanggaran hukum lingkungan.

Sugeng menegaskan penyelesaian perkara SDA tidak selalu harus berakhir di pengadilan apabila seluruh kewajiban pemulihan dipenuhi sesuai hukum. Korporasi yang membayar kerugian negara, memperbaiki lingkungan, membenahi tata kelola, dan memenuhi kewajiban lainnya dapat mempertimbangkan mekanisme penyelesaian perkara yang tersedia. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada penghukuman, tetapi menghasilkan pemulihan nyata bagi negara, lingkungan, dan masyarakat. (\*)

## Sekda Kendari Dorong DWP Perkuat Kepemimpinan Perempuan Lewat Soft Skill



### Laporan: Mashuri

KENDARI, BP- Penguatan kapasitas perempuan menjadi perhatian Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kendari melalui pelatihan soft skill strategis untuk kepemimpinan perempuan. Sebanyak 140 anggota DWP mengikuti kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, S.H., M.Si., di Ruang Rapat Serbaguna Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Selasa (8/9/2026).

Pelatihan tersebut diarahkan untuk membangun kepercayaan diri, karakter positif, serta kemampuan komunikasi anggota DWP sehingga mereka mampu mengambil peran lebih aktif dalam keluarga, organisasi, dan kehidupan bermasyarakat. Ketua DWP Kota Kendari Hj. Hasria, S.KM., M.AP., mengatakan kegiatan itu menjadi momentum untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan keterampilan anggota.

"Pelatihan soft skill menjadi momentum untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan peserta, khususnya dalam membangun kepribadian positif serta keterampilan berbicara di depan umum," kata Hasria.

Sekda Kendari Amir Hasan menempatkan kemampuan non-teknis sebagai bagian penting dalam membangun kepemimpinan perempuan. Menurut dia, perempuan tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan mengambil peran secara positif.

"Penguatan kemampuan soft skill sangat penting dalam membangun kepemimpinan perempuan yang mampu berkomunikasi, beradaptasi, dan mengambil peran secara positif," ujar Amir.

Ia mengatakan perempuan memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Peran tersebut tidak hanya berada di ruang publik, tetapi

juga dimulai dari lingkungan keluarga dan organisasi sebelum berkembang ke ruang sosial yang lebih luas.

Dua materi menjadi fokus pelatihan. Reni Emilda Susana, I.T., S.Sos., MM., menyampaikan materi "Bersinar di Dalam Membangun Kepribadian Positif", sedangkan Fitriyanti, M.Keb., C.MC., C.PS., GMC., CPSE., membawakan materi 'Public Speaking untuk Pengembangan Diri'.

Materi tersebut diharapkan membekali peserta dengan kemampuan membangun karakter positif, meningkatkan rasa percaya diri, dan menyampaikan gagasan secara efektif. Kompetensi itu dinilai semakin penting bagi perempuan yang terlibat dalam organisasi maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dorongan terhadap kepemimpinan perempuan tersebut memiliki jejak panjang dalam agenda kesetaraan global. Pada Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing, China, pada 1995, 189 negara mengadopsi Beijing Declaration and Platform for Action yang memasukkan perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan sebagai salah satu dari 12 bidang kritis. Tiga dekade kemudian, agenda tersebut masih menjadi rujukan global dalam memperluas partisipasi perempuan.

Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UN Women mencatat bahwa proporsi perempuan di parlemen dunia telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 1995. Namun, lembaga tersebut menilai kesetaraan belum sepenuhnya tercapai sehingga penguatan kapasitas dan akses perempuan terhadap pengambilan keputusan tetap diperlukan.

Selain pelatihan, DWP Kendari menggelar lomba fashion show yang diikuti perwakilan kecamatan se-Kota Kendari. Kecamatan Mandonga menjadi juara pertama dengan nilai 204, disusul Wua-Wua dengan nilai 193 dan Baruga dengan nilai 183. Kecamatan Kambu meraih nilai 182, Abeli 175, dan Nambo 122. Kegiatan ditutup dengan pemberian apresiasi kepada para pemenang sebagai penghargaan atas kreativitas dan partisipasi mereka dalam kegiatan DWP Kota Kendari 2026. (\*)

## Bupati Buton Tengah Azhari Ingatkan 188 Penerima PKH di Lakudo Gunakan Bantuan Secara Bijak



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyalurkan kartu dan buku rekening Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 188 warga Kecamatan Lakudo, Selasa pagi (8/9/2026). Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas perlindungan sosial sekaligus memastikan bantuan bagi keluarga miskin diberikan berdasarkan data yang terverifikasi.

Penyerahan berlangsung di Kantor Kecamatan Lakudo dengan penerima yang ditetapkan berdasarkan data resmi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI. Pemerintah daerah menyebut data tersebut telah melalui proses verifikasi di tingkat kecamatan sebelum bantuan diserahkan kepada masyarakat.

Bupati Buton Tengah menekankan pentingnya akurasi data dalam menentukan penerima manfaat. Menurut dia, masyarakat perlu menyampaikan kondisi kependudukan dan ekonomi secara jujur agar penetapan desil kemiskinan tidak menyimpang dari kondisi riil keluarga.

“Data penerima PKH berasal dari pusat dan sudah melalui proses verifikasi. Karena itu, masyarakat harus memberikan data yang benar agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” kata Bupati Buton Tengah.

Ia mengatakan PKH tidak semata-mata ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam jangka pendek. Bantuan tersebut juga diarahkan untuk mendorong keluarga penerima meningkatkan kesejahteraan dan secara bertahap

membangun kemandirian ekonomi.

“Gunakan bantuan ini dengan bijak, terutama untuk kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Jangan sampai disalahgunakan karena bantuan dapat dicabut jika penggunaannya tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.

Penyaluran kepada 188 warga Lakudo merupakan bagian dari distribusi bantuan yang akan dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan di Buton Tengah. Pemerintah daerah berharap mekanisme tersebut dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial sekaligus memperkuat upaya penanganan kemiskinan berbasis data.

Secara historis, PKH telah menjadi instrumen perlindungan sosial Indonesia sejak diluncurkan pemerintah pada 2007.

Kementerian Sosial menjelaskan PKH merupakan bantuan sosial bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT), yang dirancang antara lain untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta mendorong perubahan perilaku dan kemandirian.

Model bantuan tunai bersyarat juga berkembang di berbagai negara. Brasil, misalnya, mengembangkan Bolsa FamÁlia pada 2003 dengan menggabungkan sejumlah program bantuan tunai sebelumnya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa bantuan tunai dapat dipadukan dengan intervensi pendidikan, kesehatan, pendataan penerima, dan pemberdayaan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. (\*)

## KSP RI Verifikasi KNMP Malalanda, Bupati Butur Afirudin Matara Soroti Keterbatasan SDA



Laporan: Firman

BUTON UTARA, BP- Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan dominasi kawasan hutan menjadi dua persoalan utama yang disampaikan Bupati Buton Utara (Butur) Afirudin Mathara kepada Tim Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI). Persoalan itu mengemuka dalam rapat koordinasi dan dialog di Rumah Jabatan Bupati Butur setelah tim melakukan verifikasi lapangan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kamis (27/8/2026).

Afirudin mengatakan pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan langsung sekitar 30 persen dalam pengelolaan SDA. Sebagian besar kewenangan berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah kerap menghadapi keterbatasan ketika harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan perlindungan lingkungan.

“Di satu sisi, kami harus menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat. Namun, di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi mereka,” kata Afirudin.

Persoalan serupa muncul pada sektor pertanian. Sekitar 70 persen wilayah Buton Utara berada dalam kawasan hutan sehingga ruang masyarakat untuk memperluas lahan pertanian menjadi terbatas. Pemkab Butur karena itu meminta pemerintah pusat mencari solusi terhadap status dan pemanfaatan kawasan hutan

sepanjang tetap sesuai dengan regulasi.

Kunjungan KSP RI ke Buton Utara sebelumnya dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan KNMP di Desa Malalanda. Dalam kesempatan tersebut, Afirudin mendampingi tim berdialog dengan nelayan sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 10 perahu viber, 10 mesin tempel 15 PK, 10 mesin katinting 9 PK, 20 pelampung, dan 150 peralatan pancing.

Program KNMP sendiri merupakan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mulai dikembangkan secara nasional pada 2025. Pemerintah menargetkan pembantuan 100 lokasi pada tahun tersebut, terdiri atas 65 lokasi tahap pertama dan 35 lokasi tahap kedua. KKP kemudian menargetkan pengembangan hingga 1.100 KNMP sampai 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Secara historis, pendekatan pembangunan kampung nelayan di Indonesia berkembang dari sekadar penyediaan sarana produksi menuju penerapan kawasan yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi, infrastruktur, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam desain KNMP, pemerintah tidak hanya membangun fasilitas perikanan, tetapi juga mendorong koperasi, pelatihan, pengolahan, pemasaran, serta mata pencaharian alternatif.

Kehadiran KSP RI di Malalanda dinilai Afirudin penting karena memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat melihat kondisi fak-

tual daerah secara langsung. Ia berharap hasil verifikasi tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk menilai kebutuhan Buton Utara sekaligus menjembatani penyampaian usulan daerah kepada kementerian terkait.

“Kami berharap berbagai persoalan kewenangan tersebut dapat menjadi perhatian dan ditemukan solusi bersama,” ujar Afirudin. Ia juga mengapresiasi kunjungan KSP RI yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dan diharapkan menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Secara nasional, KKP mencatat program KNMP memperoleh perhatian besar sejak diluncurkan. Pada tahap awal penjangkaran 2025, pemerintah menerima 910 proposal calon lokasi dari berbagai daerah pesisir, sementara pembangunan tahap pertama untuk 65 lokasi dialokasikan sekitar Rp1,34 triliun.

Rapat koordinasi di Rujab Bupati Butur juga membahas peningkatan kualitas pelayanan publik, program prioritas, dan sejumlah isu strategis daerah. Pertemuan ditutup dengan penyerahan plakat cendera mata dari Tim KSP RI kepada Bupati Buton Utara. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Butur, Dandim 1429 Buton Utara, Kapolres Buton Utara, Sekda, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, Sekwan, Direktur RSUD Buton Utara, para kepala bagian Setda, serta para camat se-Kabupaten Buton Utara. (\*)

TP-PKK Buton Tengah Ny. Umi Noranah Azhari Perkuat Tracing TB dan CKG untuk Cegah Penularan



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH - Upaya memutus rantai penularan Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Buton Tengah diperkuat melalui pelacakan kasus secara aktif dan pemeriksaan kesehatan gratis. Program tersebut menyasar masyarakat di tingkat kelurahan dengan mengintegrasikan tracing TB dan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Ketua TP-PKK Kabupaten Buton Tengah, Ny. Umi Noranah Azhari, S.Pd., membuka kegiatan Tracing TB terintegrasi CKG di Aula Kantor Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Senin (7/9/2026). Kegiatan itu dilaksanakan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Lakudo dengan melibatkan unsur kesehatan dan kader masyarakat.

Umi Noranah menilai keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menemukan kasus TB sebelum penularan meluas. Ia meminta warga tidak menunggu kondisi memburuk

untuk memeriksakan kesehatan, terutama jika mengalami batuk berkepanjangan, demam, keringat pada malam hari, atau penurunan berat badan.

“Datang melakukan pemeriksaan bukan berarti kita sedang sakit, melainkan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab kita dalam melindungi diri serta keluarga,” kata Umi Noranah.

Menurut dia, TB harus dipandang sebagai persoalan bersama karena penyakit tersebut dapat menular melalui udara. Karena itu, edukasi mengenai gejala, pemeriksaan, pengobatan, serta pencegahan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengurangi stigma terhadap penderita.

Umi Noranah juga meminta kader TP-PKK, khususnya Pokja IV, bersama kader kesehatan lebih aktif memberikan pemahaman kepada warga. Kader diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan

kesehatan, termasuk mendorong warga yang memiliki gejala atau faktor risiko agar segera menjalani pemeriksaan.

“Jangan ragu memeriksakan kondisi kesehatan. Deteksi dini merupakan bagian penting dalam mencegah dan mengendalikan TB,” ujarnya.

Penggabungan tracing TB dengan CKG memungkinkan pemeriksaan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Warga yang ditemukan memiliki gejala atau faktor risiko selanjutnya dapat memperoleh pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai kebutuhan melalui fasilitas pelayanan kesehatan.

Urgensi pengendalian TB juga terlihat dalam skala global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 10,7 juta orang jatuh sakit akibat TB pada 2024 dan sekitar 1,23 juta orang meninggal akibat penyakit tersebut, termasuk 150.000 orang yang hidup dengan HIV.

Indonesia sendiri masih menghadapi beban TB yang besar. WHO mencatat Indonesia menyumbang sekitar 10 persen dari seluruh kasus TB baru dunia pada 2024, menempatkannya sebagai salah satu negara dengan beban TB tertinggi. WHO juga menyebut lebih dari satu juta orang diperkirakan didiagnosis TB di Indonesia pada 2025, dengan sekitar 134.000 kematian setiap tahun.

Kegiatan di Gu Timur dihadiri Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Buton Tengah Ny. Kartini Adam Basan, perwakilan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Lakudo beserta tenaga medis, jajaran TP-PKK hingga tingkat kelurahan, serta tokoh masyarakat, adat, agama, dan pemuda. Penguatan deteksi dini di tingkat komunitas diharapkan mempercepat penemuan kasus sekaligus memperkuat upaya Buton Tengah dalam menekan penularan TB. (\*)

Abu Anak Krakatau Meluas, Menkes Minta Warga Batasi Aktivitas di Luar Rumah



Peliput: Lisna

JAKARTA, BP- Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan kesehatan setelah abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menyebar ke Banten, DKI Jakarta, hingga Jawa Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat di wilayah terdampak mengurangi aktivitas di luar rumah karena paparan abu berisiko menimbulkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan masalah pada kulit.

Kementerian Kesehatan mengaktifkan Health Emergency Operating Center (HEOC) dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota terdampak. Dinas kesehatan di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat juga diminta memastikan puskesmas serta rumah sakit siap memberikan pelayanan selama 24 jam untuk mengantisipasi peningkatan pasien.

Erupsi Gunung Anak Krakatau diketahui berlangsung terus-menerus sejak Jumat (4/9/2026) dengan status Siaga atau Level III. Penyebaran abu ke sejumlah wilayah daratan dipengaruhi embusan angin. Dalam kondisi tersebut, anak-anak, lanjut usia, serta penderita penyakit pernapasan dan kardiovaskular kronis menjadi kelompok yang perlu mendapat

perhatian lebih.

“Kalau tidak ada kegiatan mendesak, usahakan tetap di dalam rumah. Namun, jika harus keluar, pastikan selalu menggunakan masker dan kacamata,” kata Budi dalam konferensi pers mengenai situasi pascaerupsi Gunung Anak Krakatau secara daring, Minggu (6/9/2026).

Kemenkes sekaligus memastikan kebutuhan medis tersedia di wilayah terdampak. Logistik yang disalurkan mencakup masker medis dan N95, tabung oksigen serta konsentrator, nebulizer, obat untuk penanganan ISPA, serta obat tetes dan salep untuk gangguan pada mata dan kulit.

Budi juga mengingatkan warga agar tidak mengucek mata ketika terkena abu vulkanik. Mata dianjurkan segera dibersihkan menggunakan air dan, bila diperlukan, diberikan obat tetes. Setelah beraktivitas di luar rumah, warga diminta membersihkan tubuh dan pakaian karena partikel abu vulkanik dapat bersifat tajam dan menyebabkan iritasi.

“Kalau debu sudah masuk ke mata, jangan duku. Bersihkan dengan air dan bila perlu gunakan obat tetes mata. Semua puskesmas sudah kita siapkan untuk menangani kondisi tersebut,”

ujarnya.

Fenomena Anak Krakatau memiliki catatan panjang dalam sejarah kebencanaan. Badan Geologi mencatat gunung api tersebut merupakan gunung api aktif tipe A di Selat Sunda yang muncul setelah letusan besar kompleks Krakatau pada 1883. Aktivitas erupsinya mulai berlangsung pada 1927 ketika tubuh gunung masih berada di bawah laut dan kemudian muncul ke permukaan pada 1929.

Pengalaman 2018 menjadi salah satu pelajaran penting. Pada 22 Desember 2018, erupsi disertai longsor sebagian tubuh Anak Krakatau memicu tsunami di kawasan Selat Sunda. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bahaya gunung api di kawasan ini tidak hanya berasal dari abu dan material erupsi, tetapi juga dapat berkaitan dengan perubahan tubuh gunung serta kondisi laut di sekitarnya.

Kemenkes kini terus berkoordinasi dengan BNPB, BMKG, dan PVMBG untuk memperbarui informasi sebaran abu sekaligus memastikan kesiapan layanan. “Sekali lagi, jangan panik. Tetap di rumah apabila tidak ada keperluan untuk keluar, gunakan masker dan lindungi mata. Jika mengalami keluhan, segera datang ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat,” kata Budi. (\*)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PT FAREN GRAFIKA</div> <div></div> <div>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</div> <div>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</div> <div>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</div> <div>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</div> | <div>Pemimpin Umum: Fauzan NWA<br/>Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi<br/>Redpel: Prasetyo<br/>Korlip: Firman<br/>Redaktur: Kasrun, Rahim<br/>Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</div> <div>Layouter: Ririn<br/>Pracetak: Aditya<br/>Cetak Jamaludin</div> <div>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA<br/>Komisaris: Erna Agule<br/>Direktur Utama: Andina Latief<br/>Manager Keuangan: Nabila DAA<br/>Manager Iklan &amp; Pemasaran: Jamaluddin<br/>Kepala Sirkulasi: Robi<br/>Administrasi: Salvana</div> <div>Kepala Biro Wakatobi: Risman<br/>Kepala Biro Buton Utara: Kasrun<br/>Kepala Biro Buton: La Harman<br/>Kepala Biro Buton Selatan: Firman<br/>Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin<br/>Kepala Biro Sultra: Masuri</div> <div>Agen Baubau: Jamaluddin<br/>Agen Buton Selatan: Firman<br/>Agen Buton: Samrihan<br/>Agen Buton Utara: Kasrun</div> <div>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,<br/>Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</div> | <div>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01<br/>Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</div> <div>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01<br/>Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Semeru Ditutup, Delapan Pendaki Nekat Masuk dan Satu Sempat Hilang



Delapan pendaki nekat mendaki Gunung Semeru secara ilegal saat status penutupan. Satu pendaki hilang, kini mereka masuk daftar hitam dan dilaporkan ke polisi.

### Laporan: Amran

SURABAYA, BP- Aktivitas pendakian Gunung Semeru yang masih ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta erupsi tidak menyurutkan langkah delapan orang untuk memasuki kawasan tersebut melalui jalur ilegal. Rombongan itu akhirnya ditemukan petugas setelah salah seorang pendaki dilaporkan tersesat dan membutuhkan pertolongan.

Salah satu pendaki yang sempat dinyatakan hilang adalah Muhammad Isa Daus Wasa (20), warga Dusun Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Tim SAR gabungan menemukan Isa di wilayah Dusun Jarak Ijo, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pada Selasa (8/9), setelah pencarian berlangsung sekitar 6 jam 45 menit.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan, informasi awal mengenai keberadaan Isa diperoleh dari ayah korban. Isa diperkirakan berada di sekitar Puncak Limpak dengan koordinat 8Â° 06' 21.24" LS dan 112Â° 54' 33.60" BT.

Sebanyak dua search and rescue

unit (SRU) kemudian dikerahkan untuk melakukan pencarian. Operasi melibatkan Unit Siaga SAR Malang Raya, BPBD Kabupaten Malang, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Bolang Rescue, Gimbal Alas, serta masyarakat sekitar.

"Setelah beristirahat, makan, dan minum untuk memulihkan tenaga, Isa kemudian dievakuasi turun bersama tim menuju posko SAR gabungan," kata Nanang.

Proses evakuasi dimulai pukul 14.30 WIB. Koordinator Unit Siaga SAR Malang Raya Imam Nahrowi mengatakan medan yang harus dilalui tim cukup ekstrem, sementara penerangan terbatas membuat perjalanan, terutama pada malam hari, harus dilakukan secara hati-hati. Tim bersama Isa tiba di posko sekitar pukul 19.00 WIB.

Setelah seluruh anggota rombongan ditemukan, petugas mengamankan mereka untuk menjalani interogasi. Kepala Bagian Tata Usaha BB TNBTS Bambang Suriyono mengatakan delapan pendaki tersebut diduga memasuki kawasan Semeru pada Senin (7/9) dini hari

melalui jalur Candi Jawar, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.

"Blacklist sudah pasti. Kami juga koordinasi dengan kepolisian. Yang jelas, kami serahkan kepada pihak kepolisian," ujar Bambang, Rabu (9/9). Para pendaki tersebut juga dilarang melakukan pendakian kembali ke Gunung Semeru dan kasusnya diserahkan kepada kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Larangan pendakian diberlakukan karena kawasan Semeru sedang menghadapi kondisi berbahaya berupa karhutla dan aktivitas erupsi yang berlangsung sejak 26 Agustus 2026. Jalur resmi ditutup sebagai bagian dari upaya menghindarkan pendaki dari ancaman aktivitas vulkanik, medan berbahaya, serta dampak kebakaran.

Risiko tersebut tidak terlepas dari karakter Semeru sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Catatan BNPB menyebut sejarah erupsi Semeru telah terdokumentasi sejak 1818, dengan aktivitas vulkanik berulang pada sejumlah periode berikutnya. Pada 3 Februari 1994, erupsi Semeru memicu hujan abu,

guguran lava, dan aliran piroklastik yang menghancurkan sebuah desa serta menewaskan enam orang.

Dalam sejarah yang lebih baru, erupsi Semeru pada 4 Desember 2021 menghasilkan awan panas guguran dan menimbulkan korban jiwa serta pengungsian dalam jumlah besar. BNPB mencatat korban meninggal mencapai 51 orang dan lebih dari 10.000 warga mengungsi pada fase penanganan bencana tersebut. Catatan Global Volcanism Program juga menggambarkan Semeru sebagai gunung api tertinggi di Pulau Jawa dengan aktivitas erupsi yang telah berulang kali tercatat dalam sejarah modern.

Kasus delapan pendaki itu kembali menunjukkan bahwa penutupan kawasan gunung api bukan sekadar pembatasan aktivitas wisata. Ketika status kawasan dinyatakan berbahaya, penerobosan jalur terlarang dapat meningkatkan risiko bagi pendaki sekaligus memaksa petugas SAR melakukan operasi penyelamatan di medan yang juga mengandung ancaman bencana. (\*)

## Kakak-Adik Hilang Sejak 2021, Polisi Bongkar Dugaan Kejahatan di Banyuasin



Ilustrasi. Dugaan pemerkosaan dan pembunuhan kakak-adik di Banyuasin terungkap setelah lima tahun. Dua pelaku ditangkap, motifnya sakit hati terhadap orang tua korban.

### Laporan: Hadi

BANYUASIN, BP- Peneemuan kerangka dua kakak-adik di sebuah rumah kosong di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, membuka kembali kasus hilangnya mereka sejak 2021. Polisi kini menangkap dua terduga pelaku yang diduga terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan terhadap RN (23) dan adiknya, AY (18).

Kerangka korban ditemukan seorang buruh harian lepas berinisial R (56) ketika mencari kayu gelam di sekitar kawasan Perumahan Amanah, Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Minggu (6/9). Temuan benda mencurigakan itu kemudian dilaporkan hingga polisi melakukan penyelidikan di lokasi.

Tidak sampai 12 jam setelah lokasi penemuan teridentifikasi, polisi menangkap RS alias Rendi Saputra (27) dan AD alias Dika (25). Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino mengatakan penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi terhadap kedua korban.

Kasus ini bermula ketika RN dan AY dinyatakan hilang pada Rabu, 27 Oktober 2021. Keduanya diketahui pergi menggunakan sepeda motor untuk bersekolah. Setelah kegiatan sekolah, RN disebut memiliki janji bertemu Rendi, yang saat itu merupakan kekasihnya.

Kapolsek Talang Kelapa Banyuasin AKP Mukhis mengatakan RN kemudian pergi bersama AY menuju kawasan Perumahan Amanah untuk menemui Rendi. Di tempat tersebut, polisi menduga terjadi tindak pidana pemerkosaan sebelum kedua korban dihabisi menggunakan senjata tajam.

Setelah kejadian, jasad kedua korban diduga ditinggalkan di rumah kosong tersebut. Selama bertahun-tahun, keluarga terus mencari RN dan AY tanpa mengetahui keberadaan mereka. Dalam rentang waktu itu, Rendi justru disebut berusaha membangun kesan seolah-olah ikut prihatin terhadap hilangnya korban.

"Hasil pemeriksaan tersangka Rendi menutupi kejahatannya dengan sandiwara, bahkan menghadiri acara yasinan keluarga korban agar tak menimbulkan kecurigaan," kata Risnan, Selasa (8/9).

Menurut polisi, dugaan sand-

iwara itu berlangsung selama sekitar lima tahun. Rendi disebut turut mendampingi keluarga dalam proses pencarian korban. Polisi kini menelusuri bagaimana tersangka dapat menyembunyikan dugaan kejahatan tersebut selama bertahun-tahun.

Dari pemeriksaan awal, motif pembunuhan diduga berkaitan dengan sakit hati terhadap orang tua korban. Risnan mengatakan pengakuan awal tersangka mengarah pada dugaan bahwa persoalan tersebut menjadi pemicu perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan. "Dari pemeriksaan awal pengakuan pelaku karena sakit hati terhadap orang tua korban, sehingga korban nekat merencanakan pembunuhan tersebut dan memperkosa korban," ujarnya.

Kasus Banyuasin tersebut terjadi di tengah persoalan kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi perhatian nasional. Komnas Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2024, meningkat 14,17 persen dibandingkan 2023 yang mencapai 289.111 kasus. Data itu mencakup berbagai bentuk kekerasan dan tidak secara khusus menggambarkan perkara Banyuasin.

Secara global, persoalan pembunuhan perempuan oleh orang terdekat juga menjadi perhatian. Studi UNODC menunjukkan pada 2021 sekitar 56 persen seluruh perempuan yang menjadi korban pembunuhan di dunia dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga. Angka tersebut merupakan konteks global dan tidak berarti kasus Banyuasin termasuk kategori yang sama sebelum hubungan pelaku dan korban dibuktikan melalui penyidikan.

Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua tersangka. Salah satu tersangka disebut sempat berusaha melawan saat ditangkap sehingga petugas mengambil tindakan tegas. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti untuk mengurai hubungan para tersangka dengan orang tua korban, motif pembunuhan, serta dugaan pemerkosaan dan pembunuhan secara utuh. "Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Banyuasin," kata Risnan. (\*)

## Kepala BKPSDM Busel Haida Tegaskan BKPSDM Buton Selatan Akan Evaluasi Disiplin ASN Lewat Monitoring Tanpa Pemberitahuan, Ini Sesuai Perintah Bupati Busel H Muh Adios

penting karena daerah tersebut dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Pembentukan daerah otonom baru itu antara lain ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. UU tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 23 Juli 2014.

Haida mengatakan pembenahan tidak hanya diarahkan pada disiplin, tetapi juga citra pelayanan BKPSDM. Ia ingin mengubah

anggapan bahwa layanan kepegawaian identik dengan proses rumit. Pegawai diminta memberikan pelayanan dengan ramah dan mempermudah masyarakat, terutama warga dari wilayah kepulauan yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus keperluan administrasi.

“Kita ini pelayanan. Kita harus tunjukkan, kita jadi contoh untuk OPD

lain,” ujar Haida. Ia menegaskan penanganan pelanggaran disiplin dilakukan bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga proses lebih lanjut apabila pelanggaran tetap dilakukan. Di internal BKPSDM, ia juga meminta pegawai menjaga kedisiplinan agar fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.”Pak Bupati mempercayakan kepada BKPSDM Busel untuk melakukan pengawasan pegawai di semua OPD,” tutupnya. (\*)

## Kepala BPBD Baubau Moh Tasdik Turun Langsung Kaji Kekeringan Bungi, Petani Usulkan PIPANISASI AIR

Kondisi tersebut diketahui setelah Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau Dr. Mohamad Tasdik, M.Si., bersama Kepala Dinas Pertanian Kota Baubau Ibnu Wahid, S.T., M.M., dan sejumlah perangkat daerah melakukan monitoring langsung ke lahan pertanian di Bungi, Sabtu (5/9/2026). Dari pemeriksaan lapangan, sebagian sawah masih memperoleh aliran air dan tanaman tumbuh normal, tetapi petak di ujung jaringan irigasi mulai mengalami kekeringan dengan tanah yang terlihat merekah.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan memperkuat pasokan melalui pompanisasi. Kepala Dinas Pertanian Kota Baubau Ibnu Wahid mengatakan BWS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat akan memberikan dukungan berupa subsidi BBM solar untuk mesin alkon guna memperlancar pompanisasi pengairan. Sementara itu, pendataan dilakukan per hamparan dan pemilik lahan dengan kategori ringan, sedang, berat hingga puso. Data sementara menunjukkan dampak di Bungi masih dominan ringan hingga sedang dan belum merata.

Di lapangan, petani meminta pemerintah memastikan pembagian air berlangsung lebih adil hingga petak-petak sawah yang berada di bagian hilir. PIPANISASI dari sumber air menuju hamparan sawah menjadi salah satu usulan karena dinilai dapat mengurangi kehilangan air sebelum mencapai

lahan yang berada di ujung jaringan. “Untuk jangka pendek, yang bisa segera kita dorong adalah pengaturan giliran air yang lebih adil, dukungan pompa pada titik yang masih memungkinkan disuplai, serta pendampingan penyuluh di lapangan,” kata Mohamad Tasdik.

Tasdik menegaskan BPBD berfungsi mengoordinasikan penanganan lintas perangkat daerah berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Hasil kaji cepat tersebut akan diserahkan kepada Dinas Pertanian untuk menjadi bahan laporan kepada pimpinan daerah dan dasar penyusunan rekomendasi. “Kami tidak ingin bekerja hanya di atas laporan. Sebaran titiknya, luas lahan yang benar-benar terdampak, dan seberapa berat kondisinya harus kami lihat langsung dari lahan dan kami dengar langsung dari petani,” ujarnya.

Untuk jangka menengah, Dinas Pertanian akan mendorong perbaikan jaringan irigasi tersier bersama perangkat daerah terkait, menyesuaikan jadwal tanam, dan menggunakan varietas berumur genjah yang lebih tahan terhadap kekurangan air. Petani juga didorong memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi sebagai perlindungan terhadap risiko gagal panen. “Pendataan kami lakukan per hamparan dan per pemilik lahan, dengan kategori ringan, sedang, berat, sampai puso,” ujar Ibnu.

## Kebakaran Hanguskan Dua Rumah di Lakudo, Bupati Buton Tengah Azhari Pastikan Korban Dibantu

(6/9/2026) sekitar pukul 16.30 WITA. Rumah milik Zainuddin (38) dan Wa Nae-no (70) terbakar dalam peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian materiil yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Penanganan api dilakukan dengan mengerahkan dua unit mobil Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Petugas berjibaku memadamkan kobaran api hingga berhasil mengendalikan kebakaran sekitar pukul 18.00 WITA.

Dari dua keluarga yang terdampak, Zainuddin diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp130 juta. Sejumlah barang

berharga masih dapat diselamatkan, termasuk ijazah dan sepeda motor.

Kebutuhan korban menjadi perhatian pemerintah daerah setelah kebakaran. Melalui Dinas Sosial Buton Tengah, pemerintah menyalurkan beras, mi instan, minyak goreng, pakaian siap pakai untuk balita hingga lansia, kebutuhan medis dasar, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari.

Dalam kunjungan tersebut, Azhari didampingi Kepala Dinas Sosial Buton Tengah Dra. Nurlia Husuni, M.Si., serta anggota DPRD Buton Tengah Mutalib, S.Pd.I., Samirun, S.Pd., dan Dahlan. Kehadiran

pemerintah dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan awal keluarga terdampak dapat terpenuhi setelah kehilangan tempat tinggal.

Azhari mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap warga yang tertimpa musibah. Ia juga memastikan penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi dilanjutkan dengan upaya pemulihan secara bertahap sesuai kondisi korban.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan pribadi, kami menyampaikan duka serta keprihatinan yang mendalam atas musibah ini,” kata Azhari.

Kondisi Bungi berlangsung ketika tekanan kekeringan secara nasional meningkat. BMKG memprediksi musim kemarau 2026 cenderung lebih kering dan lebih panjang dibanding kondisi normal; pada pemuat akhiran Juni, 437 Zona Musim atau 48,77 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemarau lebih panjang dari normal. Pada Agustus 2026, BMKG juga mencatat 535 ZOM atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, dengan El Nino berada pada intensitas sangat kuat.

Kekeringan akibat El Nino bukan fenomena baru bagi Indonesia. BMKG mencatat 1997, 2015, dan 2019 sebagai periode kekeringan dan kelangkaan air yang terkait El Nino; kekeringan terluas dan ekstrem pada periode 2011-2020 terjadi pada 2015 dan 2019, masing-masing mencakup lebih dari separuh wilayah Indonesia. Dalam skala global, El Nino 1997-1998 juga menyebabkan pola cuaca ekstrem: Indonesia mengalami kekeringan dan kebakaran, sementara sejumlah wilayah Amerika Selatan justru menghadapi hujan ekstrem dan banjir. (\*)

Menurut dia, kehilangan tempat tinggal dalam waktu singkat merupakan beban berat bagi keluarga korban. Karena itu, pemerintah daerah berupaya hadir untuk meringankan kebutuhan dasar warga sekaligus mendukung proses pemulihan setelah bencana.

Penanganan tersebut sejalan dengan kerangka penanggulangan bencana nasional. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana secara teren-

## Ny Siti Norma Adios Dorong TP PKK Buton Selatan Tertibkan Data dan Administrasi

menjadi bagian penting dalam memastikan program organisasi berjalan terukur. Menurut dia, data keluarga yang akurat diperlukan agar pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Tata kelola administrasi yang rapi, tertib, dan akuntabel di tingkat kecamatan maupun desa adalah fondasi utama agar 10 Program Pokok PKK dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Siti Norma dalam kegiatan tersebut.

Pembinaan juga mencakup penyusunan program kerja, pengarsipan, pembuatan laporan kegiatan, serta mekanisme pendataan keluarga. Siti Norma menekankan perlunya keseragaman pola kerja antara pengurus kecamatan dan desa sehingga pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami ingin memastikan bahwa baik di Lapandewa maupun di Sampolawa, seluruh program PKK berjalan dengan serentak dan seirama dari desa ke kabupaten,” ujarnya.

Secara historis, gerakan PKK telah berkembang menjadi salah satu instrumen pemberdayaan keluarga berbasis masyarakat di Indonesia.

## Pengurus HKTI Baubau Terbentuk, Tiga Kecamatan Jadi Basis Pertanian, iap Dilantik Serentak di Kendari 10 September 2026

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perindagkop, serta Kepala Dinas Kominfo Kota Baubau.

Hamsinah mengatakan HKTI diharapkan tidak berhenti sebagai wadah organisasi, tetapi mampu menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang mengantungkan kehidupan pada sektor pangan. “Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan HKTI, program-program ke depan akan berfokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian,” katanya.

Baubau memiliki ruang pengembangan pertanian yang cukup besar. Dari delapan kecamatan di kota tersebut, tiga kecamatan memiliki basis pertanian. Kondisi itu menjadi modal bagi HKTI untuk mendorong intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk pertanian sekaligus memperkuat keterhubungan dengan sektor perikanan dan peternakan.

“Muara dari penguatan produktivitas tersebut adalah peningkatan kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan di daerah,” ujar Hamsinah. Pemerintah kota berharap keberadaan HKTI juga dapat mendukung agenda ketahanan pangan nasional yang mencakup pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lingkungan.

Pelantikan serentak di Kendari dinilai menjadi tahap awal konsolidasi organisasi HKTI di Sulawesi Tenggara. Menurut Hamsinah, kepengurusan HKTI di sejumlah kabupaten/kota umumnya berada

Pemerintah kemudian memperkuat pengakuan dan kelembagaan gerakan tersebut secara nasional pada 1972. Dalam perkembangannya, 10 Program Pokok PKK mencakup bidang Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, koperasi, lingkungan hidup, serta perencanaan sehat.

Dalam konteks global, pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas juga mendapat perhatian dalam agenda pembangunan perempuan dan keluarga. UN Women mencatat bahwa gerakan PKK di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai gerakan berbasis masyarakat yang mengembangkan peran perempuan dalam pengelolaan keluarga dan pembangunan komunitas.

Melalui pembinaan tersebut, TP PKK Kabupaten Buton Selatan berharap pengurus di Lapandewa dan Sampolawa semakin mampu mengelola organisasi secara tertib, menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menjalankan 10 Program Pokok PKK secara terukur sehingga manfaatnya lebih nyata bagi keluarga di tingkat desa hingga kabupaten. (\*)

di bawah kepemimpinan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. “Tentunya ini akan menjadi momentum penting konsolidasi organisasi HKTI di wilayah Sulawesi Tenggara,” katanya.

Secara historis, HKTI bukan organisasi baru dalam ekosistem pertanian Indonesia. Organisasi itu didirikan di Jakarta pada 27 April 1973 melalui penyatuan 14 organisasi tani. HKTI menyebut tujuan pembentukannya antara lain menghimpun, membina, dan memberdayakan petani serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan pertanian.

Dalam konteks global, penguatan organisasi petani juga telah lama dipandang penting untuk meningkatkan posisi tawar produsen kecil. FAO mencatat organisasi petani dan koperasi dapat membantu petani kecil memperoleh akses pasar, kredit, pelatihan, serta memperkuat daya tawar melalui kerja bersama. Peran tersebut semakin relevan ketika pertanian menghadapi tekanan perubahan iklim, tuntutan pasar, dan kebutuhan produksi pangan berkelanjutan.

Dengan pelantikan yang dijadwalkan berlangsung di Kendari, pengurus HKTI Baubau kini bersiap menjalankan konsolidasi organisasi. Pemerintah kota menempatkan kolaborasi tersebut sebagai instrumen untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus menghubungkannya dengan agenda ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (\*)

siapsiagaan. Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 yang disepakati 187 negara pada 18 Maret 2015 menekankan pemahaman risiko, penguatan tata kelola, investasi ketangguhan, serta kesiapsiagaan dan pemulihan yang lebih baik. (\*)

cana, terpadu, dan menyeluruh, termasuk pada tahap tanggap darurat dan pascabencana.

Secara global, pendekatan penanggulangan bencana juga berkembang dari sekadar respons setelah kejadian menuju pengurangan risiko dan ke-

## Dana Kelurahan dan CSR Jadi Andalan Baubau Percepat Eliminasi AIDS, TB, Malaria



### Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memperluas strategi penanggulangan AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria (ATM) dengan mengandalkan pembiayaan kolaboratif di luar APBD. Dana Kelurahan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan didorong menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penemuan kasus, hingga pendampingan pengobatan masyarakat.

Langkah tersebut mengemuka dalam Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (PP ATM) di Baubau, Selasa (8/9/2026). Pertemuan dibuka Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., dan melibatkan Bapperida, BPKAD, Dinas Kesehatan, camat, lurah, kepala puskesmas, direktur rumah sakit, serta perwakilan ADINKES Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut La Ode Darus Salam, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBD untuk mengejar

target eliminasi penyakit ATM. Karena itu, keterlibatan pemerintah di tingkat kelurahan, dunia usaha, dan berbagai sektor lain perlu diperkuat.

"Tantangan eliminasi ATM bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan tanggung jawab kita bersama," kata La Ode Darus Salam.

Ia meminta Dana Kelurahan tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen pembangunan fisik. Sebagian dukungan anggaran dapat diarahkan untuk kegiatan nonfisik yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, seperti edukasi, pelacakan kasus, serta pemantauan kepatuhan penderita dalam menjalani pengobatan.

Pendekatan berbasis masyarakat tersebut menjadi penting karena penanggulangan penyakit menular membutuhkan kesinambungan layanan setelah pasien ditemukan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan koordinasi antara fasilitas kesehatan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat berjalan hingga tingkat lingkungan.

Secara global,

agenda tersebut memiliki pijakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui target 3.3, yang menargetkan berakhirnya epidemi AIDS, TB, dan malaria pada 2030. Strategi global WHO untuk malaria juga menetapkan sasaran pengurangan sedikitnya 90 persen angka kejadian dan kematian akibat malaria pada 2030.

Upaya pengendalian ketiga penyakit itu memiliki sejarah panjang. Di Indonesia, program pemberantasan malaria secara formal telah dimulai sejak peluncuran Malaria Eradication Command (KOPEM) pada 12 November 1959. Program tersebut kemudian berkembang menjadi program pengendalian dan eliminasi malaria yang terintegrasi dengan sistem kesehatan.

Sementara itu, agenda global mengakhiri epidemi TB diperkuat melalui End TB Strategy yang disepakati negara-negara anggota WHO pada 2014. Strategi tersebut menargetkan penurunan insiden TB sebesar 80 persen dan kematian akibat TB sebesar 90 persen pada 2030 dibandingkan 2015. Indonesia sendi-

ri terus menghadapi beban TB yang tinggi; WHO memperkirakan sekitar 1,09 juta kasus terjadi pada 2023.

Dalam forum di Baubau, pemerintah daerah kemudian merumuskan empat komitmen yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan. Pertama, memasukkan pengurangan ATM sebagai isu prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Kedua, menyusun indikator kinerja yang jelas dan terukur. Ketiga, menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan prioritas kesehatan. Keempat, memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program lebih efektif di lapangan.

"Optimalisasi pendanaan kolaboratif seperti Dana Kelurahan dan penguatan CSR perusahaan menjadi sebuah keharusan," ujar La Ode Darus Salam. Melalui pola tersebut, Pemkot Baubau berharap upaya penanggulangan ATM tidak berhenti pada program sektoral, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, fasilitas kesehatan, dan dunia usaha. (\*)

## Perkuat SDM, Diskominfo Baubau Turun Langsung Dampingi Pelaku UMKM Digital hingga Tingkat Kelurahan



### Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beradaptasi dengan perubahan pola perdagangan melalui penguatan keterampilan digital. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Baubau menerapkan pola jemput bola dengan mendatangi langsung pelaku UMKM untuk memberikan pendampingan literasi dan keterampilan digital.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperluas kemampuan pelaku usaha memanfaatkan teknologi, terutama melalui affiliate marketing dan live shopping. Diskominfo menilai penguasaan teknologi menjadi semakin penting agar pelaku UMKM di tingkat akar rumput tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital.

Kepala Diskominfo Kota Baubau H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., mengatakan pendampingan langsung diperlukan karena sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memahami teknologi dan mengoperasikan perangkat pintar. "Pendampingan langsung ini menjadi kunci untuk meruntuhkan hambatan teknis yang sering dihadapi pelaku UMKM tradisional," katanya.

Menurut Andi Hamzah, kehadiran aparaturnya di lapangan sekaligus mengubah pola pelayanan pemerintah dari sekadar menunggu masyarakat menjadi lebih aktif mendatangi dan mem-

bantu masyarakat. Aparatur sipil negara (ASN) ditempatkan sebagai fasilitator dan edukator agar proses adopsi teknologi dapat berlangsung secara praktis.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Baubau yang tercantum dalam RPJMD 2025-2030. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pijakan, termasuk mendorong masyarakat dan pelaku UMKM memiliki daya saing melalui penguasaan teknologi digital.

"Pelaku UMKM harus memiliki daya saing yang lebih tinggi melalui penguasaan teknologi digital," ujar Andi Hamzah. Pemanfaatan teknologi, lanjut dia, juga membuka peluang bagi produk lokal Baubau untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mulai dari tingkat nasional hingga internasional.

Dorongan digitalisasi UMKM bukan semata agenda daerah. Secara nasional, UMKM telah lama menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. Pemerintah mencatat sektor tersebut berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Pada 2008, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai salah satu landasan hukum pengembangan sektor tersebut.

Transformasi digital kemudian menjadi tantangan baru. Pada 2022, pemerintah mencatat sekitar 64,2 juta UMKM di Indo-

nesia, tetapi baru sekitar 17,5 juta yang telah masuk ekosistem digital dan memanfaatkan perdagangan elektronik. Pemerintah saat itu mendorong digitalisasi karena teknologi dapat memperluas basis konsumen, meningkatkan pendapatan, serta menekan biaya pemasaran dan distribusi.

Perubahan tersebut semakin terasa secara global setelah pandemi Covid-19 pada 2020. UNCTAD mencatat pembatasan mobilitas mempercepat penggunaan perdagangan elektronik dan teknologi digital; porsi perdagangan ritel elektronik global meningkat dari sekitar 14 persen pada 2019 menjadi sekitar 17 persen pada 2020. Perubahan itu menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi secara digital semakin menentukan daya tahan pelaku usaha.

Diskominfo Baubau berharap pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan omzet sekaligus kemandirian ekonomi daerah. "Kami berharap literasi digital dapat merata di seluruh kecamatan dan kelurahan se-Kota Baubau sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku UMKM," kata Andi Hamzah. Upaya tersebut diharapkan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis digital sekaligus membuka jalan bagi produk lokal Baubau menuju pasar yang lebih luas. (\*)